

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses multidimensional yang berfokus pada peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas hidup, pengembangan infrastruktur serta perubahan pada struktur ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesempatan kerja. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan dengan masalah pengangguran, Saubani (2025) dan Mediana (2025) dalam kompas.com dan rupublika.com menyebutkan Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam tiga besar dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS Jawa Barat dan Sakernas, pengangguran ini didominasi oleh usia muda (15-24 tahun) dengan lulusan pendidikan SMK/Sederajat ke atas.

Perdebatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran telah lama menjadi perhatian dalam makroekonomi. Teori Klasik dalam buku *Macroeconomics Theories and Policies* oleh R. Froyen (2005:300), menyatakan bahwa pengangguran dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Klasik percaya bahwa pengangguran dapat diatasi dengan fleksibilitas tingkat upah, sehingga dapat menekan sisi penawaran tenaga kerja (Kempirmase et al., 2025). Sedangkan menurut Teori Permintaan Efektif oleh John Maynard Keynes (1936) dalam buku R.Froyen (2005:93), menjelaskan bahwa

masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Keynesian menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti mendorong minat investasi asing maupun domestik.

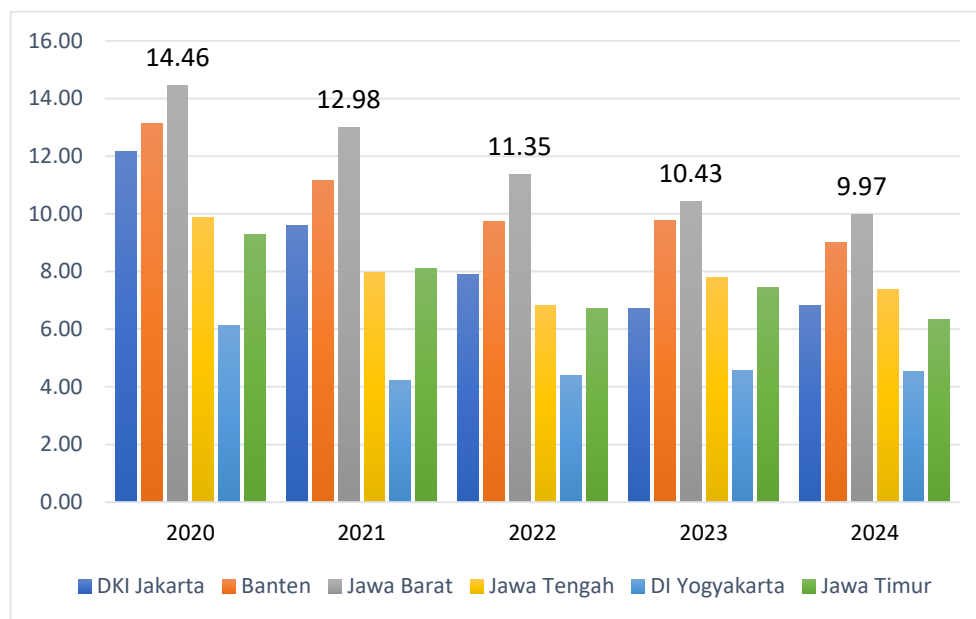
Teori penawaran tenaga kerja (*Labor Supply Theory*) oleh Adam Smith dalam buku *Principles of Macroeconomics* oleh Mankiw (2004), menjelaskan bahwa pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menggambarkan insentif pertumbuhan ekonomi yang membaik dan tersedianya tenaga kerja yang produktif.

Berdasarkan Teori *Human Capital* oleh Becker dalam buku *Economic Development* oleh Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menurunkan tingkat pengangguran. Sementara itu, dalam teori pasar tenaga kerja oleh Borjas dalam buku *Labor Economics* menjelaskan bahwa ketika jumlah permintaan tenaga kerja berpendidikan tinggi tumbuh lebih cepat dibandingkan penawaran tenaga kerja, akan terjadi kelebihan pasokan dan sebagian dari lulusan tersebut terjebak dalam kondisi tidak sesuai dengan keterampilannya (*skill mismatch*) (Borjas, 2016:231). Sedangkan, Teori pertumbuhan oleh Harrod-Domar dalam buku Todaro & Smith (2006:113-119) menyatakan bahwa penanaman modal dalam bentuk investasi di sektor tertentu dapat mendorong penciptaan lapangan

pekerjaan baru, sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui ekspansi penyerapan tenaga kerja.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana individu yang termasuk ke dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya, hal ini disebabkan karena kekurangan pengeluaran agregat (Sukirno, 2004:13). Tingkat pengangguran terdidik tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Provinsi Jawa Barat, dengan angka mencapai 9,97% pada tahun 2024. Masalah tingginya angka pengangguran terdidik di Jawa Barat ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Barat yang mencapai 50,76 juta jiwa, dan sebanyak 26,18 juta jiwa merupakan angkatan kerja sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja. Meskipun lapangan pekerjaan di Jawa Barat terus bertambah, namun masih terdapat kekurangan lapangan pekerjaan karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan ketidaksesuaian keahlian, menyebabkan tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat masih sangat tinggi.

Transformasi di pasar tenaga kerja saat ini telah merubah kegiatan perekonomian, pekerjaan yang didominasi oleh pekerjaan disektor padat karya bergeser menjadi sektor padat modal yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja karena digantikan oleh teknologi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang kini berubah menjadi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi (Andabayeva et al., 2024:6). Akan tetapi, meskipun sektor padat modal lebih membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, faktanya tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh angkatan kerja dengan lulusan SMA/Sederajat keatas, dimana seharusnya angkatan kerja ini lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena memiliki keahlian dan pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber : Data BPS yang diolah tahun 2020-2024

Gambar 1.1 merupakan grafik tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di 6 provinsi di pulau jawa periode 2020-2024, grafik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa masih cukup tinggi dan tidak stabil. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 14,46% di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten mencapai 13,12%, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta cukup rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya pada tahun 2020 yang hanya 6,13%.

Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terdidik meningkat signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah harus membuat kebijakan untuk membatasi segala aktivitas kehidupan, akibatnya banyak perusahaan mengalami kerugian dan harus melakukan PHK kepada para karyawannya (Tu *et al.*, 2021:6). Penurunan angka pengangguran terdidik terjadi pada tahun 2021-2024, terutama pasca pandemi COVID-19 yang pada awalnya

menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran akibat kontraksi ekonomi. Pulau Jawa merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan serta pusat industri, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menjadi penyebab pencari kerja berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan daya serap pasar kerja.

Pada tahun 2024, seluruh provinsi berhasil menurunkan tingkat pengangguran meskipun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik tertinggi di pulau Jawa dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat mencapai 9,97%. Fenomena ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal dalam mengakselerasi peningkatan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Jawa Barat yang mengakibatkan angkatan kerja terus bertambah, tetapi penciptaan lapangan pekerjaan masih terbatas (Adipratomo et al., 2024).

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat dalam BPS Jawa Barat jumlah penduduk hingga akhir tahun 2024 mencapai 50,76 juta jiwa dengan 26,18 juta jiwa merupakan angkatan kerja. Peningkatan jumlah penduduk ini menjadikan angka partisipasi angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya, apabila tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang, maka fenomena ini dapat menimbulkan masalah pengangguran. Hasil Sakernas tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 72,36% penduduk usia muda merupakan pengangguran lulusan SMA dan SMK, bahkan

sebanyak 40,71% pengangguran merupakan lulusan SMK yang tentunya memiliki keahlian sesuai jurusan pada masa sekolahnya.

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat masih sangat tinggi yaitu 6,77% hingga Agustus 2025, angka tersebut menjadikan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Masalahnya, pengangguran ini didominasi oleh penduduk usia muda terutama lulusan SMK mencapai 12,42%, SMA 9,28%, bahkan perguruan tinggi mencapai 9,47% (Fitriani, 2025).

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat (2020-2024) (Persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terdidik					
	(%)					
	SD kebawah	SLTP	SMA	SMK	Diploma I/II/III	Universitas
2019	4,28%	8,45%	10,96%	14,63%	7,48%	6,84%
2020	5,68%	10,70%	13,73%	18,75%	9,85%	10,19%
2021	6,07%	9,53%	13,51%	16,71%	6,38%	7,21%
2022	4,69%	8,22%	12,18%	14,63%	5,45%	5,71%
2023	3,93%	6,92%	10,60%	12,65%	4,79%	4,77%
2024	2,89%	6,07%	11,19%	12,74%	5,76%	5,53%

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Barat 2019-2024

Data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024 pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan paling tinggi terjadi pada lulusan SMK yang semula pada tahun 2019 diangka 14,63%, naik menjadi 18,75% pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi covid-19, sehingga banyak

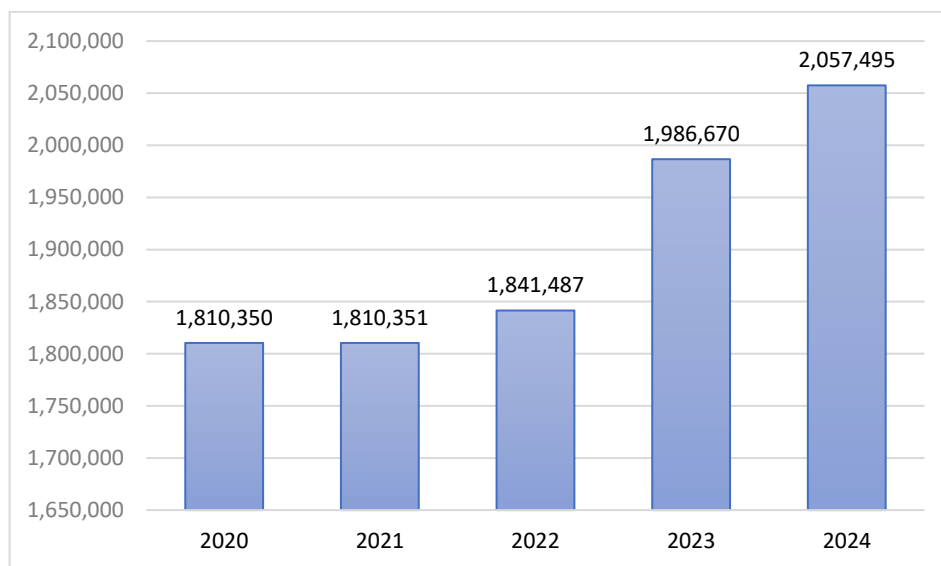
perusahaan atau industri melakukan PHK dan memutus penerimaan tenaga kerja, mengingat lulusan SMK merupakan kelompok yang paling bergantung pada sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, elektronik, otomotif, dan jasa modern.

Peningkatan pengangguran juga terjadi pada lulusan universitas, dari 6,84% pada tahun 2019 menjadi 10,19% pada tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingginya pendidikan formal tidak menjamin terbebas dari risiko menganggur, terutama pada saat perekonomian mengalami kontraksi. Pemberhentian sementara perekrutan sektor formal, persaingan tenaga kerja yang sudah berpengalaman yang terdampak PHK, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan berketerampilan tinggi di wilayah Jawa Barat, menjadi faktor penyebab pengangguran terdidik meningkat tajam.

Memasuki tahun 2021 sampai 2023 tingkat pengangguran terdidik mengalami tren penurunan yang konsisten pada hampir seluruh tingkat pendidikan, seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat, membaiknya kinerja industri, dan meningkatnya permintaan tenaga kerja akibat adanya PHK masal pada saat pandemi. Sektor informal seperti perdagangan mikro, kuliner rumah tangga, serta jasa mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lulusan SD hingga SLTP, hal ini menjadikan lulusan SD hingga SLTP mengalami perbaikan lebih cepat. Akan tetapi, bagi lulusan SMK, Diploma, hingga Universitas, penurunan tenaga kerja lebih lambat, karena proses adaptasi industri pasca pandemi membutuhkan waktu, termasuk restrukturisasi organisasi, otomatisasi, dan penyesuaian tingkat upah.

Pada tahun 2024, pengangguran lulusan SMA, SMK, Diploma dan Sarjana di Jawa Barat mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena rendahnya tingkat kesempatan kerja di sektor formal, serta bertambahnya jumlah angkatan kerja yang

tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja (Wulandari & Woyanti, 2023). Pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat meningkat signifikan sekitar 4,4 juta orang daripada tahun sebelumnya, sebagai akibat dari bonus demografi dan generasi produktif (Gen Z) yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan peluang kerja bagi generasi muda yang produktif. Peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan seperti beasiswa atau subsidi, menjadikan lulusan sekolah dan perguruan tinggi bertambah pesat atau sering disebut dengan “*over supply*”. Akan tetapi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terdidik, apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

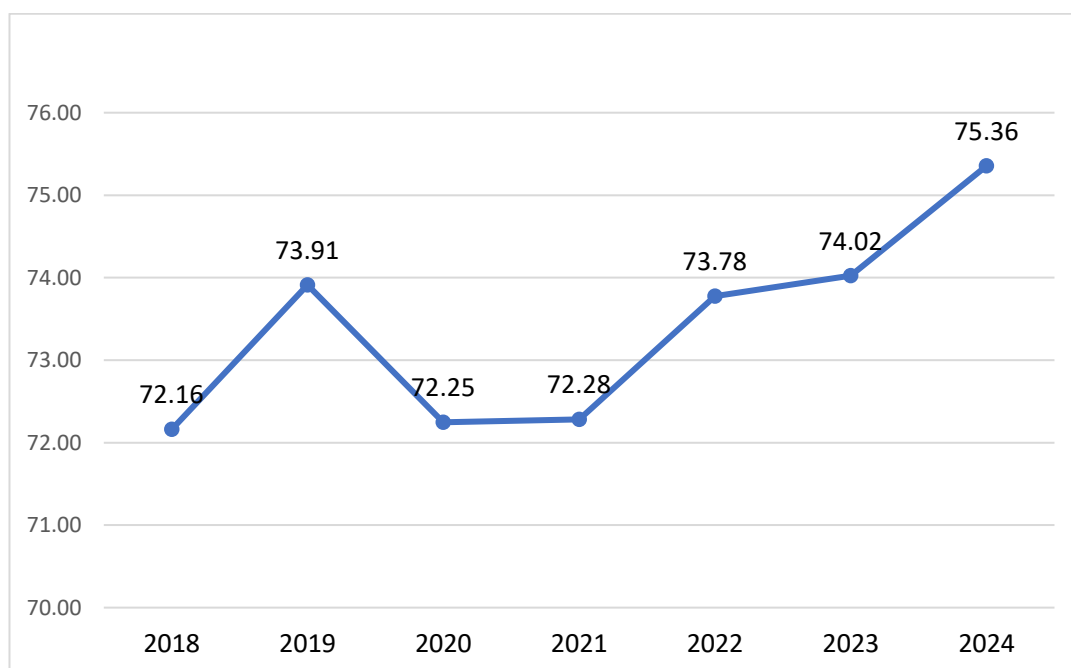


Sumber : Data BPS Jawa Barat 2020-2024

Gambar 1. 2 Jumlah Upah Minimum di Jawa Barat (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang signifikan, terlihat bahwa pada tahun 2020 UMP di Jawa Barat hanya berkisar Rp1.810.350-, meningkat hingga Rp2.057.495 pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena kebijakan yang dimiliki pemerintah

Indonesia termasuk pemerintah daerah Jawa Barat untuk menaikkan upah minimum setiap tahun, kebijakan ini diciptakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pekerja, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang memberi kebijakan dalam regulasi tingkat upah nasional. Dari kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akan tetapi, pada tahun 2021 tingkat upah tidak mengalami kenaikan dikarenakan kontraksi ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk menstabilkan daya beli masyarakat melalui pemberian subsidi gaji/upah serta bantuan sosial seperti kartu prakerja, serta bantuan sosial lainnya.



Sumber : Data BPS Jawa Barat 2020-2024

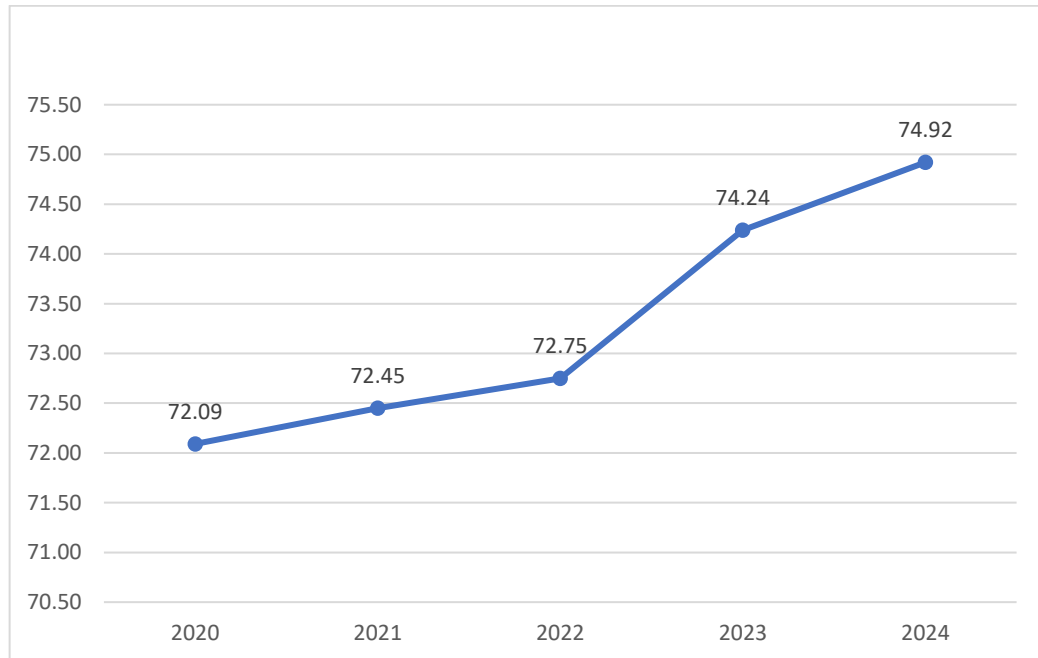
**Gambar 1. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik di Provinsi Jawa Barat
(Persen)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik (TPAK) di Jawa Barat mengalami fluktuatif dengan kecenderungan mengalami peningkatan pada akhir periode yaitu 2024. Pada tahun 2018 hingga 2019, TPAK Terdidik meningkat dari 72,18% menjadi 73,91%, kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja sedang membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang relatif stabil di angka 5,07%, adanya ekspansi sektor industri pengolahan dan jasa, serta meningkatnya lulusan SMA dan perguruan tinggi yang aktif masuk ke pasar kerja.

Pada tahun 2020 hingga 2021, TPAK Terdidik menurun di kisaran 72,25% hingga 72,28%. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, pembatasan aktivitas produksi, serta penundaan rekrutmen tenaga kerja diseluruh sektor. Akibatnya, banyak lulusan terdidik memilih untuk menunda masuk ke pasar tenaga kerja, seperti melanjutkan pendidikan, memulai bisnis rumahan, atau keluar dari pasar kerja karena rendahnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terdidik di Jawa Barat kembali menunjukkan tren peningkatan, dari 73,78% pada tahun 2022 menjadi 75,36% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi, serta didukung oleh normalisasi aktivitas industri, percepatan investasi baik asing maupun domestik terutama di wilayah Bekasi dan Karawang, peningkatan tingkat upah, serta ekspansi sektor jasa modern dan ekonomi digital yang lebih banyak menyerap tenaga kerja terdidik. Selain itu, tekanan ekonomi rumah tangga pascapandemi seperti meningkatnya harga minyak, LPG dan BBM yang menyebabkan harga-harga di pasar meningkat, menyebabkan lulusan kerja

terdidik aktif bekerja atau mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka partisipasi kerja terdidik meningkat.

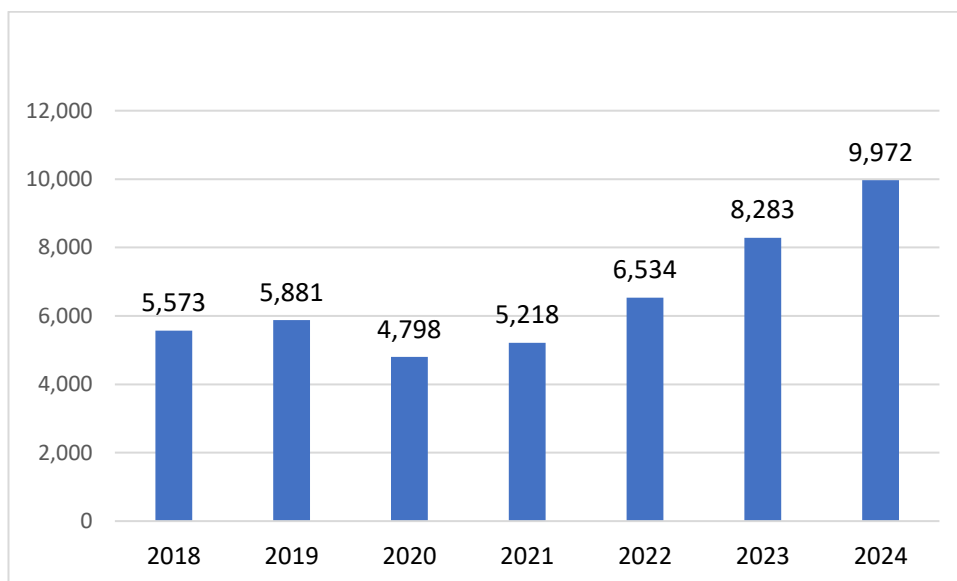


Sumber : Data BPS Jawa Barat tahun 2020-2024

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat (Persen)

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dari 72,09% pada tahun 2020 menjadi 74,92% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan maupun standar hidup mengalami perbaikan yang konsisten. Dalam teori *Human Capital* menyebutkan bahwa, peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan modal utama dalam meningkatkan produktivitas individu. Akan tetapi, pada kenyataannya, meskipun angka IPM mengalami tren peningkatan (gambar 1. 4), tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat masih menunjukkan gejala peningkatan hingga tahun 2024 (tabel 1.1). Salah satu penyebab utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan

kerja yang sepadan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan dengan lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Kenaikan IPM pada dimensi pendidikan menghasilkan lebih banyak lulusan SMA, SMK, Diploma, dan Sarjana setiap tahun, namun jumlah lapangan kerja modern berbasis teknologi, profesional, dan industri bernilai tambah tinggi tidak tumbuh secepat peningkatan suplai tenaga kerja tersebut. Akibatnya, terdapat *over supply* tenaga kerja terdidik yang tidak sejalan dengan kebutuhan pasar. Seperti dalam literatur ketenagakerjaan Indonesia, peningkatan kualitas SDM tidak otomatis menurunkan pengangguran apabila struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor padat karya dengan nilai tambah rendah.



Sumber : Data BPS tahun 2018-2024

Gambar 1.5 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat (Juta US\$)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa realisasi PMA di Jawa Barat berfluktuasi setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2018 berkisar 5.573 juta US\$ yang mengalami tren penurunan hingga tahun 2020 mencapai 4.798 juta US\$ dan tahun 2021 mencapai 5.218 juta US\$. Tren penurunan pada tahun 2018-2020 diakibatkan

oleh beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi, pembatasan aktivitas (*lockdown*) serta gangguan rantai pasokan global membuat para investor menunda atau membatalkan investasi di Jawa Barat.

Realisasi PMA di Jawa Barat kembali mengalami tren peningkatan yang dimulai dari tahun 2022 berkisar 6.534 juta US\$ meningkat hingga 9.972 juta US\$ pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memperbaiki layanan investasi dan kemudahan membuka usaha, penyelesaian proyek-proyek mangkrak oleh BKMP yang membangun kepercayaan investor, serta penerbitan regulasi untuk investasi seperti UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah di Indonesia yang paling diminati oleh investor terutama yang berasal dari Singapura, Hong Kong, China, Malaysia dan Amerika Serikat, terbukti dengan investasi yang masuk dari PMA dan PMDN mencapai Rp 72,5 triliun rupiah pada triwulan II tahun 2025, capaian tersebut dapat berkontribusi pada realisasi investasi Nasional di Indonesia sebesar 15,2%.

Peningkatan lapangan pekerjaan di sektor padat modal memang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terdidik yang kompeten, tetapi pertumbuhan penduduk di Jawa Barat yang terus meningkat menyebabkan angkatan kerja juga bertambah, sehingga terjadi persaingan di pasar tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran terdidik terus meningkat karena sulit terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat dan Perguruan Tinggi menjadi permasalahan yang sangat serius, mengingat pencari kerja dengan

lulusan pendidikan menengah ke atas seharusnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki keahlian yang baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar tenaga kerja lebih mudah diserap oleh pasar tenaga kerja karena keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh pencari kerja, hal ini sejalan dengan teori *Human Capital*. Tingkat upah minimum yang tinggi, diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terdidik sesuai dengan teori klasik. Sementara itu, investasi asing pada sektor yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sesuai dengan teori pertumbuhan oleh Harrod Domar.

Berdasarkan teori dan data empiris mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan, serta terdapat masalah pada tingkat pengangguran terdidik di provinsi Jawa Barat. Penulis menemukan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat.

Teori *Job Matching* yang dikembangkan oleh Boyan Jovanovic (1979) dalam penelitian Pellizzari & Fichen (2017:3), Teori pasar tenaga kerja oleh Borjas yang diperkuat oleh OECD dalam *Skill Outlook*, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik sebagai akibat dari peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi indikator IPM, apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai, akan menimbulkan masalah *Skill Mismatch* di kalangan pencari kerja terdidik sehingga pengangguran terdidik meningkat. Akan tetapi, teori *human capital* oleh Becker dan Schultz menyebutkan bahwa peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM, dapat meningkatkan produktivitas.

Penelitian terdahulu mengenai pengangguran terdidik umumnya memasukkan variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi, demografi, atau faktor sosial, serta menggunakan rentang data yang relatif pendek. Namun, sangat terbatas penelitian yang meneliti terkait pengangguran, khususnya pengangguran terdidik melalui pendekatan faktor ekonomi dan pasar tenaga kerja secara simultan, khususnya dengan memasukkan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terdidik pada tingkat Provinsi Jawa Barat dengan rentang data jangka panjang, kondisi ini menunjukkan adanya celah konseptual dan empiris yang belum terjabarkan pada penelitian sebelumnya dan menjadi *gap* dari penelitian ini. *Novelty* dari penelitian ini, terletak pada penggunaan variabel TPAK Terdidik sebagai variabel independen yang jarang diteliti pengaruhnya terhadap pengangguran terdidik. Selain itu, Penemuan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik mengindikasikan adanya fenomena *skill mismatch*.

Berdasarkan uraian latar belakang serta fenomena dan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini mengambil judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2024** sebagai salah satu upaya memberikan bukti secara empiris atas masalah pengangguran terdidik di wilayah Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Tingkat Pengangguran Terdidik, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2024 ?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2024?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Tingkat Pengangguran Terdidik, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terdidik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2024.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA), secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Barat tahun 2009-2024.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Jawa Barat tahun 2009-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru, serta memberikan bukti empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik. Temuan dari penelitian dapat menjadi rujukan akademik untuk menguji konsistensi teori *human capital*, teori upah, serta teori pasar tenaga kerja dalam konteks regional Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat membuka ruang bagi penelitian lanjutan terkait *skill mismatch* tenaga kerja, industri berbasis skill, maupun dinamika pertumbuhan inklusif sehingga dapat mendorong pengembangan teori yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan pasar tenaga kerja terhadap tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat.
2. Kegunaan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik serta permasalahan yang sama.
3. Kegunaan bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi terpercaya seperti Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Sakernas dan Open Data Jabar.

